

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori pengembangan dalam penelitian ini, yakni teori koordinasi (Hasibuan) kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin. Maka dapat disimpulkan bahwa pihak terkait dalam proses koordinasi baik itu Dinas Sosial, Satpol PP dan DPMPPA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak) telah melakukan koordinasi dalam rangka penanganan anak jalanan di Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Beberapa poin lainnya yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara Dinas Sosial Kota Jambi, Satpol PP, dan DPMPPA dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi menunjukkan bahwa setiap instansi telah memahami dan menjalankan peran serta tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Dinas Sosial berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan anak jalanan, Satpol PP berperan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda), sedangkan DPMPPA bertugas dalam aspek edukasi dan advokasi perlindungan anak. Kejelasan peran ini memastikan bahwa fungsi masing-masing instansi saling melengkapi dalam mencapai tujuan bersama.

2. Komunikasi yang terjadi antara instansi dilakukan secara informal melalui surat, aplikasi pesan seperti WhatsApp, dan telepon. Meskipun metode ini memungkinkan respon cepat dan penanganan yang segera terhadap situasi di lapangan, ketergantungan pada komunikasi informal ini mengindikasikan bahwa belum ada struktur komunikasi formal yang teratur dan terencana. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas dalam perencanaan strategis dan evaluasi kegiatan, serta bisa menimbulkan risiko misinformasi atau kesalahpahaman antar instansi.
3. Pembagian kerja yang jelas antar instansi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi lapangan yang dinamis menjadi keunggulan dalam penanganan anak jalanan. Fleksibilitas ini memungkinkan setiap instansi untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap berbagai kondisi yang muncul, meskipun seringkali kegiatan penjangkauan tidak berdasarkan jadwal yang tetap. Keadaan ini menunjukkan adanya kemampuan adaptasi yang baik, namun juga mengindikasikan perlunya sistematisasi yang lebih terstruktur dalam operasi lapangan.
4. Pendekatan yang ada saat ini cenderung fokus pada solusi jangka pendek seperti penjangkauan dan pemulangan anak jalanan. Untuk mencapai hasil yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, perlu dikembangkan strategi jangka panjang yang meliputi pembinaan, pendidikan, dan pendampingan agar anak-anak jalanan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik.

Dengan mempertimbangkan keempat variabel yang mempengaruhi koordinasi pemerintahan kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan DPMPPA dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi telah dilakukan dengan cukup baik. Untuk solusi efektif dan berkelanjutan, perlu ada koordinasi erat antar lembaga, keterlibatan multi-stakeholder, dan pembinaan berkelanjutan bagi anak jalanan. Rapat koordinasi formal dan strategi holistik harus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti bermaksud memberikan saran atau masukan terhadap penanganan anak jalanan di Kota Jambi. Diharapkan saran ini dapat membantu dalam penanganan anak jalanan di Kota Jambi di masa mendatang, yaitu:

1. Mengadakan rapat koordinasi rutin antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA). Rapat ini akan berfungsi sebagai forum komunikasi formal yang penting untuk membahas permasalahan yang dihadapi dan mengembangkan strategi penanganan yang efektif. Melalui rapat ini, setiap instansi akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi di lapangan, sehingga dapat bekerja secara lebih sinergis.
2. Membentuk tim kerja khusus yang terdiri dari perwakilan setiap instansi terkait, yayasan, rumah singgah, dan komunitas peduli anak. Tim ini

bertugas untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program penanganan anak jalanan secara holistik dan berkelanjutan. Dengan adanya tim kerja lintas sektor, setiap aspek penanganan anak jalanan dapat dikelola dengan lebih terintegrasi, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat bekerja menuju tujuan yang sama.

3. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif sangat diperlukan. SOP yang jelas akan memberikan panduan langkah-langkah yang harus diambil mulai dari penjangkauan, assessment, rehabilitasi, hingga pembinaan berkelanjutan. SOP ini akan memastikan bahwa setiap instansi mengikuti prosedur yang sama, mengurangi risiko tumpang tindih tugas dan memastikan alur kerja yang lebih efisien dan efektif.
4. Penyusunan kesepakatan bersama yang mencakup strategi dan tanggung jawab bersama antara Dinas Sosial, Satpol PP, dan DPMPPA. Kesepakatan ini dapat berbentuk dokumen formal yang memuat peran masing-masing instansi, mekanisme koordinasi rutin, serta target dan indikator pencapaian yang jelas.
5. OPD terkait perlu rutin mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi petugas lapangan mengenai teknik-teknik penjangkauan yang humanis dan tanpa kekerasan. Pelatihan ini juga bisa mencakup aspek psikologis dan sosial anak jalanan untuk meningkatkan empati dan pemahaman petugas terhadap situasi yang dihadapi oleh anak-anak tersebut.